

Call for Papers untuk Jurnal Tematis
**Kembalinya otoritarianisme? - Tata kelola pemerintahan demokratis di Indonesia
dan Timor Leste**

Publikasi oleh Watch Indonesia! e.V.



Pada saat Timor Leste sekitar 20 tahun pasca kemerdekaannya masih terus berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, Indonesia justru menunjukkan sejumlah tanda-tanda kembali ke otoritarianisme.

Proses demokratisasi yang bermula pada tahun 1998 di Indonesia pada awalnya sangat menjanjikan. Reformasi politik menghasilkan sistem multipartai, penghapusan kursi tetap militer dari parlemen, pembentukan institusi-institusi politik, kebebasan pers, dan desentralisasi lembaga administrasi negara. Perkembangan selanjutnya menunjukkan proses demokratisasi tidak membawa perubahan mendasar terhadap struktur kekuasaan otoriter yang berlaku di masa pemerintahan Suharto (1966-1998).

Mandegnya proses demokratisasi sudah menjadi salah satu tantangan terbesar Indonesia sebelum Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai presiden pada tahun 2014. Setidaknya sejak kuartal terakhir masa jabatan pertamanya tercatat kemunduran dalam pewujudan tata kelola pemerintahan yang demokratis serta kecenderungan pengekan bertambah. Hal ini terlihat dari beberapa langkah kebijakan serta perkembangan politik dalam negeri yang melemahkan proses dan lembaga pendukung demokratisasi, mengekan kebebasan sipil, mengurangi transparansi politik, dan menguatkan pengaruh aliansi (informal) politik, yang terdiri dari tiga serangkai politik, pengusaha, dan militer. Dalam konteks ini instrumen hukum justru sering digunakan untuk melemahkan supremasi hukum.

Perlindungan hak warga negara sangat tergantung kepada kondisi kedaerahan dan kepentingan finansial atau politik tertentu. Kelindan antara kekayaan pribadi dan kekuasaan politik para penguasa politik dan elit pengusaha tercermin dalam politik lokal. Hal ini mengakibatkan beberapa peraturan hukum justru melemahkan partisipasi politik di tingkat lokal terlepas dari desentralisasi yang diundangkan pada tahun

1999. Hal ini terjadi baik di level pembuatan kebijakan, pelaksana kebijakan maupun di masyarakat sipil. Pengaruh politik, ekonomi, dan sosial oligarki baru dan lama demikian pula aktor pelaksana kebijakan, khususnya anggota militer, menguat. Sistem pendanaan partai dan kampanye merupakan salah satu sumber utama terjadinya korupsi besar-besaran di samping pembatasan pelibatan perempuan dan kelompok etnis minoritas. Tak jarang kewajiban akan transparansi serta pelibatan publik dalam proses pembuatan kebijakan atau pembangunan infrastruktur dan proyek pengembangan ekonomi dilangkahi. Salah satu contoh terbaru baik dari sisi tata pemerintahan yang transparan maupun sentralisasi kekuasaan dan pengeroposan elemen demokrasi yaitu UU Cipta Kerja (Omnibus).

Sekitar 20 tahun setelah merdeka **Timor Leste** masih terus berhadapan dengan tantangan yang sampai hari ini belum teratasi dalam bidang hukum dan akses terhadap keadilan, tata pemerintahan lokal yang efektif, korupsi, persamaan hak yang efektif, kebebasan pers, dan hak asasi manusia.

Pelencengan kekuasaan dan nepotisme juga menandai tata kelola pemerintahan di Timor-Leste. Sistem politik didominasi oleh klientelisme dan lemahnya akuntabilitas. Besarnya ketergantungan sektor privat terhadap pendanaan negara makin menyuburkan nepotisme. Pada saat yang bersamaan institusi hukum juga belum netral dan korupsi masih merajalela. Hal ini tidak semata-mata karena kurangnya pendanaan kepada lembaga antikorupsi. Hasil pemilu ulang pada tahun 2018 pada awalnya menunjukkan situasi yang stabil. Dalam perkembangannya persoalan pembagian kekuasaan dan penunjukan anggota kabinet menemui jalan buntu bagi pemerintah dan presiden. Situasi ini berdampak buruk pada negosiasi anggaran negara dan efektivitas layanan publik di kuartal pertama 2019 dan selanjutnya.

Persoalan peraturan perundang-undangan tentang kepemilikan tanah dan properti tetap tidak terselesaikan. Undang-undang dari masa pendudukan Portugal, Indonesia serta era pasca kemerdekaan yang bertentangan satu sama lain menambah ketidakpastian hukum.

Pandemi dan Otoritarianisme

Di seluruh dunia pandemi telah mempertajam ketimpangan yang sudah ada sebelumnya dan menguatkan kecenderungan kebijakan yang otoriter. Bahwa pandemi corona membawa pengaruh negatif terhadap perwujudan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan menyuburkan tendensi pemerintahan otoriter sesungguhnya telah diperkirakan sebelumnya. Pada masa sebelum pandemi pemerintah Indonesia telah mempersiapkan sejumlah rancangan UU yang berkarakter otoriter dan mengeluarkan dekrit yang sering bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pada masa krisis covid kecenderungan pemerintahan otoriter terlihat dari penerbitan dekrit untuk menghindari kontrol parlemen dan pelaksanaan undang-undang yang kontroversial tanpa proses legislasi dan pelibatan masyarakat sipil. Di kedua negara akses terhadap hukum dan layanan publik menjadi lebih sulit.

Dalam rangka penerbitan jurnal tematis ini kami mengundang para ahli dan masyarakat sipil yang berjuang untuk demokrasi untuk membagi pandangan, analisis, dan perspektif tentang dampak perkembangan politik saat ini di Indonesia dan Timor Leste terhadap demokrasi/demokratisasi.

Sementara Timor Leste kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat dan politik internasional, Indonesia justru berada di panggung politik dan ekonomi dunia. Pemerintah Jerman dan Uni Eropa bermaksud meningkatkan hubungan ekonomi dan politik dengan Indonesia. Persoalan tata pemerintahan yang demokratis dan hak asasi manusia sayangnya kurang diperhatikan baik dalam negosiasi multilateral maupun bilateral.

Tujuan publikasi ini adalah untuk memfasilitasi pengetahuan yang mendalam serta analisis kritis serta usulan solusi yang berdasarkan pada analisis, pandangan, dan pengalaman regional. Publikasi ini nantinya

menyasar politisi Jerman dan Uni Eropa serta organisasi-organisasi yang bekerja di bidang hak asasi manusia, hubungan Selatan-Utara, sebagaimana aktivis dan pejuang HAM. Jurnal tematis ini akan diterbitkan secara cetak dan online dalam Bahasa Jerman dan sedapat mungkin dalam Bahasa Inggris secara cuma-cuma.

Pertanyaan panduan:

1. Apa saja tantangan terkini demokrasi?
2. Tindakan dan perkembangan apa saja yang menunjukkan/mendukung adanya tendensi otoriter dan dengan cara apa ini terjadi?
3. Apa dampak UU dan rencana reformasi hukum serta politik pemerintah saat ini terhadap tata kelola pemerintahan demokratis dan masyarakat sipil?

Berikut ini adalah tema-tema yang diharapkan dapat didiskusikan dalam jurnal tematis ini. Kami juga menerima tema-tema usulan tambahan.

1. Negara dan Ekonomi

- a) Korupsi dan Transparansi
 - Kemauan politik untuk pemberantasan korupsi
 - Institusi dan mekanisme pemberantasan korupsi
- b) Peraturan/kebijakan untuk perusahaan/sector swasta
- c) Peraturan dan mekanisme untuk memastikan keikutsertaan masyarakat dalam perekonomian.
- d) Hubungan eksekutif, khususnya militer, dengan sector swasta/ekonomi

2. Hukum dan Keadilan

- a) Hukum atas perlindungan yang sama melalui undang-undang
- b) Hak untuk bebas dari penangkapan atau penahanan sewenang-wenang
- c) Hak atas proses hukum yang adil
- d) Kepastian hukum
- e) Mekanisme dan lembaga yang menjamin hak hidup, kebebasan, dan keamanan

3. Negara dan gender

- a) Mekanisme dan aturan pemberantasan kekerasan (seksual) terhadap perempuan dan LGBTI
- b) Mekanisme dan kerangka normatif persamaan hak untuk perempuan dan LGBTI di tempat kerja
- c) Partisipasi politik perempuan
- d) Perlakuan yang sama di depan hukum terhadap perempuan dan LGBTI.

4. Negara, pemerintah, dan masyarakat sipil

- a) Pemberian kesempatan dan akses warga negara dalam proses partisipasi publik
- b) Kebebasan beraktivitas dan berpartisipasi bagi serikat buruh dan organisasi HAM dan lingkungan hidup
- c) Akses terhadap informasi mengenai kebijakan pemerintah (pemilu, undang-undang, RUU)
- d) Kesempatan partisipasi politik bagi masyarakat sipil
- e) Pembatasan ruang gerak aktivis HAM dan lingkungan hidup

5. Negara dan Media

- a) Media yang bebas dan akses terbuka akan informasi

- b) Akses terbuka akan informasi bagi semua warga negara
- c) Kebebasan berorganisasi, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul

6. Negara dan Agama

- a) Pluralisme agama
- b) Mekanisme dan lembaga yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah.

7. Transparansi tindakan/kebijakan pemerintah: desentralisasi dan pembagian kekuasaan

- a) Hak atas partisipasi politik, berbicara dan mengambil keputusan bagi daerah
- b) Korupsi politis
- c) Hubungan antara legislatif dan eksekutif

Kontribusi dari lintas isu sangat diharapkan. Kami mendukung masyarakat, khususnya kontributor dari Indonesia dan Timor Leste, serta perempuan dan penulis dengan latar belakang lintas isu. Kontributor diharapkan mengirimkan judul dan atau outline singkat tulisan tidak lebih dari 200 kata paling lambat tanggal **6 Juni 2021** kepada Christine Holike via email ke watchindonesia@watchindonesia.de (informasi mengenai tahap selanjutnya akan diberitahukan). Untuk memastikan kualitas penerjemahan kami sangat mengharapkan naskah final dalam Bahasa Indonesia/Inggris dikirimkan paling lambat pada **10 Agustus 2021**. Publikasi ini akan diterbitkan dan didistribusikan pada bulan September 2021.

Pedoman Penulisan

Isi naskah maksimal **enam halaman atau 10.000 karakter** (termasuk spasi). Ini sudah melingkupi teks utama, abstrak, tabel, biografi singkat penulis, dan referensi (apabila dibutuhkan). Mohon diperhitungkan skala dan besaran huruf untuk tabel, grafik, dan ilustrasi, karena keseluruhan bagian dari tulisan akan dihitung berdasarkan jumlah kata.

Foto tambahan dipersilahkan menjadi bagian dari tulisan dengan mencantumkan keterangan sumber.

Mit freundlicher Unterstützung von/Supported by/Didukung oleh:

